

BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN-PELATIHAN KEPADA PENGELOLA PPID UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama, termasuk unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), UIN Ar-Raniry Banda Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu langkah nyata yang ditempuh adalah dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia serta Komisi Informasi Pusat (KIP).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kemampuan teknis pengelola PPID dalam memenuhi indikator penilaian keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik.

B. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman pengelola PPID UIN Ar-Raniry terhadap mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan kemampuan teknis dalam pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan pemenuhan indikator evaluasi.
3. Memperkuat sinergi antara PPID UIN Ar-Raniry dengan PPID Kementerian Agama dan unit PTKN lainnya.

C. Kegiatan Bimtek/Pelatihan

1. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Unit PTKN

Kegiatan pendampingan ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Biro Humas dan Komunikasi Publik, dan dilaksanakan pada Kamis, 4 Juli 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal Lantai II, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat. UIN Ar-Raniry Banda Aceh diwakili oleh Eka Saputra, selaku Kepala Subtim Hubungan Masyarakat (Humas).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag RI, Akhmad Fauzin, yang menekankan pentingnya optimalisasi peran PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik di seluruh unit kerja Kemenag. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa meskipun UU Nomor 14 Tahun 2008 telah berusia 15 tahun, masih banyak unit kerja yang belum sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi informasi secara optimal. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai skala penilaian Komisi Informasi Publik (KIP), yang membagi kategori badan publik mulai dari *Informatif* hingga *Tidak Informatif* dengan rentang nilai 0–100.

Akhmad Fauzin juga menggarisbawahi pentingnya implementasi KMA Nomor 92 Tahun 2019, yang menegaskan peran PPID utama Kemenag dalam mengoordinasikan PPID unit-unit di bawahnya, termasuk Kanwil dan PTKN. Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan PPID pada PTKN, termasuk UIN Ar-Raniry, dapat bergerak secara sistematis dan cepat dalam menghadapi proses Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat.

2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Self Assessment Questionnaire (SAQ) PPID Unit PTKN Zona 2 (Wilayah Sumatera)

UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan SAQ PPID Unit PTKN Zona 2 (Wilayah Sumatera) yang diselenggarakan di Laboratorium Komputer Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, pada 31 Juli – 1 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Prof. Khairuddin, selaku Wakil Rektor II dan Ketua PPID UIN Ar-Raniry, serta Eka Saputra, Ketua Subtim Humas dan Informasi.

Bimtek ini dipandu oleh Siti Azizah, tenaga ahli dari Komisi Informasi Pusat, dan turut dihadiri oleh Syafrudin, Ketua Subtim PPID Kementerian Agama, bersama Kabag TU Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag RI. Materi yang disampaikan berfokus pada tata cara pengisian SAQ, penyesuaian indikator penilaian Monev, serta praktik terbaik (*best practices*) dari beberapa PTKIN yang berhasil meraih kategori Informatif, seperti UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Khairuddin menegaskan komitmen UIN Ar-Raniry untuk menindaklanjuti arahan Menteri Agama dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap unit kerja universitas. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola informasi yang transparan, profesional, dan akuntabel di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Hasil dan Dampak

Kedua kegiatan tersebut memberikan manfaat signifikan bagi PPID UIN Ar-Raniry. Melalui pendampingan dan bimtek ini, tim PPID memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai indikator penilaian keterbukaan informasi publik, tata cara pengisian SAQ, serta strategi meningkatkan nilai evaluasi agar dapat mencapai kategori Badan Publik Informatif.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat koordinasi antara PPID UIN Ar-Raniry dengan PPID utama Kemenag, serta memperluas jejaring kerja sama dengan PTKN lain di wilayah Sumatera dalam rangka berbagi pengalaman dan praktik terbaik pengelolaan informasi publik.

E. Penutup

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan Pendampingan Monev dan Bimtek SAQ PPID Zona 2, UIN Ar-Raniry Banda Aceh menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat diimplementasikan secara konsisten dalam pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan UIN Ar-Raniry, sehingga universitas dapat meraih predikat “Badan Publik Informatif” pada evaluasi mendatang dan terus menjadi contoh penerapan transparansi di perguruan tinggi keagamaan negeri.

LAMPIRAN

Dokumentasi Bimtek / Pelatihan kepada pengelola PPID UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Kegiatan pendampingan monev KIP pada Badan Publik Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2025.



Kegiatan Bimtek Pendampingan Self Assessment Questionnaire PPID Unit PTKN Zona 2 Wilayah Sumatera) di UIN Raden Fatah Palembang, 31 Juli – 1 Agustus 2025.